

# **Analisis Kebutuhan Lahan Berdasarkan Distribusi Sebaran Penduduk di Kabupaten Mamuju**

**\*Radinal Jayadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia

*\*Corresponding Author, Email: [dinaltarung009@gmail.com](mailto:dinaltarung009@gmail.com)*

## **Abstrak**

Analisis kebutuhan lahan berbasis distribusi penduduk di Kabupaten Mamuju diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan sektoral yang berimplikasi pada pemanfaatan ruang dan sumber daya agraria. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan evaluatif bagi proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju tahun 2025, sehingga arah pengaturan pola ruang dan struktur ruang di masa mendatang dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi eksisting. Metode analisis yang digunakan meliputi penilaian ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya serta pemetaan distribusi penduduk terhadap zona yang tersedia dan tidak tersedia untuk pemanfaatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya di Kabupaten Mamuju mencapai 1.215 km<sup>2</sup>, sementara 3.736 km<sup>2</sup> dikategorikan tidak tersedia, termasuk kawasan lindung. Dari total penduduk, tercatat 259.539 jiwa berada pada kawasan dengan ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 29.520 jiwa tinggal pada kawasan yang tidak tersedia dan sebagian besar berada dalam kawasan lindung menurut ketentuan RTRW. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan penetapan kawasan lindung dan peningkatan inventarisasi penguasaan lahan dalam kawasan hutan yang menjadi objek reforma agraria, termasuk pelaksanaan redistribusi lahan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya agraria di Kabupaten Mamuju diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

**Kata kunci:** Ketersediaan Lahan, Penguasaan Lahan, Distribusi Penduduk, Kawasan Lindung, Reforma Agraria

## **Abstract**

*An analysis of land requirements based on population distribution in Mamuju Regency is essential for evaluating sectoral policies that influence spatial utilization and agrarian resource management. This study aims to provide an evaluative foundation for the revision process of the 2025 Regional Spatial Plan (RTRW) of Mamuju Regency, ensuring that the future direction of spatial structure and land-use patterns can be formulated more comprehensively and responsively to existing conditions. The analytical methods employed include assessing land availability for cultivation activities and mapping population distribution across zones categorized as available and unavailable for such utilization. The findings indicate that land availability for cultivation activities in Mamuju Regency covers 1,215 km<sup>2</sup>, while 3,736 km<sup>2</sup> are classified as unavailable, including designated protected areas. Of the total population, 259,539 residents occupy areas where land is available for utilization, whereas 29,520 residents live in areas categorized as unavailable, most of which fall within protected zones as defined by the RTRW. These results underscore the need to evaluate policies related to protected area designation and enhance the inventory of land tenure within forest areas that serve as objects of agrarian reform, including the redistribution of land to local communities. Accordingly, the utilization of agrarian resources in Mamuju Regency is expected to proceed more effectively, efficiently, and sustainably, while maintaining a balance between development needs and environmental conservation.*

**Keywords:** Land Availability, Land Tenure, Population Distribution, Protected Areas, Agrarian Reform

## I. PENDAHULUAN

Penduduk merupakan elemen vital yang membentuk dinamika geografis dan sosial suatu wilayah (Montalvo *et al.*, 2019). Distribusi penduduk—yang merujuk pada pola spasial persebaran manusia dalam suatu ruang—menjadi fokus penting dalam berbagai bidang kajian seperti demografi, geografi, sosiologi, dan ilmu lingkungan (Willekens, 2016). Pemahaman yang akurat mengenai distribusi penduduk sangat krusial bagi perencanaan perkotaan, pengembangan infrastruktur, pengambilan keputusan kebijakan, dan analisis sosial-ekonomi (Leyk *et al.*, 2019). Oleh karena itu, informasi mengenai pola persebaran penduduk memiliki signifikansi besar dalam pengaturan penatagunaan pertanahan di Kabupaten Mamuju. Secara ekonomi dan geopolitik, Kabupaten Mamuju kini menempati posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Sulawesi Barat. Berbagai paket kebijakan investasi menjadikan daerah ini sebagai wilayah dengan daya tarik tinggi bagi pemilik modal. Posisi Mamuju sebagai episentrum ekonomi dan pusat pemerintahan provinsi meningkatkan nilai tawarnya dalam kegiatan investasi, sebagaimana digambarkan oleh Jayadi (2020), “di mana ada gula, di situ ada semut.” Kabupaten Mamuju Pusat Kegiatan Nasional (PKN), mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang signifikan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2014–2024), jumlah penduduk bertambah sebanyak 33.411 jiwa, atau rata-rata 3.341 jiwa per tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2025). Tingginya pertumbuhan penduduk, sebagaimana terjadi di banyak wilayah Indonesia, berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan lahan bagi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Apabila percepatan pembangunan tidak diikuti dengan perencanaan ruang yang matang, potensi konflik pertanahan dan degradasi kualitas lingkungan ruang menjadi semakin besar.

Lahan merupakan sumber daya strategis bagi keberlangsungan hidup manusia, namun ketersediaannya bersifat tetap dan tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara keterbatasan ruang dan intensitas permintaan pemanfaatan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan pertanahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut telah diatur secara eksplisit dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, yang mengatur hak-hak penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Harsono, 1999). Pengaturan yang komprehensif mengenai pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan merupakan prasyarat penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals/SDGs*, yang menekankan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan (Tenrisau, 2021). Perspektif *land management* dalam terintegrasinya aspek *land tenure*, *land use*, *land value*, dan *land development* yang ditopang oleh *land information infrastructures* serta kebijakan pertanahan yang tepat menjadi syarat tercapainya pembangunan berkelanjutan (Pfeifer & Hamann, 2018). Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh merusak fungsi ekologis lingkungan hidup. Manajemen pertanahan, sebagaimana dikemukakan Enemark (2005), merupakan proses pengaturan sumber daya agraria agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Lemmen *et al.* (2015) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya agraria membutuhkan pendekatan sistematis guna meningkatkan stabilitas hukum pertanahan sebagai jaminan atas hak dan pemanfaatannya.

Aspek manajemen pertanahan bertujuan mekanisme pengendalian lahan dan ruang diarahkan untuk mengatur faktor-faktor penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan lahan dan ruang agar dapat dikelola secara optimal oleh pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Upaya ini diharapkan mampu mendorong tercapainya kemakmuran masyarakat yang berkelanjutan (Djakaria, D. V. S., & Husein, 2017). Dinamika distribusi penduduk merupakan variabel strategis yang perlu diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam perumusan kebijakan sektoral pada tingkat kementerian dan lembaga.

Ketidaksinkronan antar-kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan ketersediaan lahan, meningkatnya konflik pertanahan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah. Ketersediaan informasi spasial mengenai kondisi eksisting lahan dan potensi tanah untuk kegiatan budidaya, pembangunan, dan investasi di Kabupaten Mamuju menjadi elemen fundamental dalam menyusun arah pembangunan yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan evaluatif yang komprehensif bagi proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju tahun 2025.

## **II. METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, metode penelitian dalam analisis distribusi sebaran penduduk berdasarkan ketersediaan lahan menggunakan pendekatan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Metode kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif bertujuan menggali data atau informasi mengenai suatu fenomena atau kondisi objektif secara deskriptif. Sukmadinata (2011) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and to explore*) serta menjelaskan (*to describe and to explain*) fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, penerapan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dijelaskan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara distribusi penduduk dan ketersediaan lahan di Kabupaten Mamuju. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan informasi melalui dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dijadikan sumber data meliputi laporan resmi pemerintah, peta kawasan hutan, data statistik, surat keputusan penetapan kawasan hutan.

### **II.1.1 Analisis Sebaran Distribusi Penduduk**

Kemajuan teknologi spasial meliputi fotografi udara, pemantauan satelit, dan Sistem Informasi Geografis (SIG) telah memberikan kemampuan yang semakin canggih dalam pemetaan dan pemodelan distribusi penduduk (Balsa-Barreiro *et al.*, 2021). Teknik analisis spasial memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geografis terkait populasi manusia dengan tingkat presisi yang tinggi (Tatem, 2017). Salah satu pendekatan pemodelan yang umum digunakan untuk memetakan distribusi penduduk adalah pembangunan basis data spasial menggunakan sistem grid berskala tetap. Dalam penelitian sebelumnya, peta distribusi penduduk Kabupaten Sumbawa dikembangkan menggunakan sistem grid berukuran 5' × 5' (0,155 km × 0,155 km) dengan memasukkan variabel yang memengaruhi persebaran penduduk, seperti tutupan lahan, jenis jalan, batas administrasi, serta data sensus penduduk per kecamatan (Rusdi Nengsih, 2015). Pada penelitian ini, pembuatan peta distribusi penduduk Kabupaten Mamuju dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: 1). pembangunan sistem grid berskala ragam untuk seluruh wilayah Kabupaten Mamuju; 2). penggabungan data spasial, meliputi kelas tutupan lahan, jaringan jalan, dan batas administrasi, dengan grid wilayah; 3). penyusunan model matematis yang mengombinasikan data spasial dan nonspasial untuk menentukan densitas populasi; dan 4). validasi serta visualisasi hasil pemodelan distribusi penduduk.

Seluruh tahapan dilaksanakan menggunakan perangkat lunak ArcGIS versi 10.8. Sistem grid yang digunakan berukuran 5" × 5", setara dengan 0,15 km × 0,15 km, sehingga setiap sel grid merepresentasikan area seluas 2,25 hektare. Pada tahap pemodelan matematis, densitas penduduk dihitung melalui proses pembobotan kelas lahan berdasarkan nilai fungsi lahan, baik fungsi ekonomi maupun sosial. Nilai bobot ini kemudian digunakan untuk menghitung estimasi jumlah penduduk pada setiap grid, sehingga diperoleh peta distribusi penduduk yang lebih

representatif terhadap kondisi keruangan aktual. Pembobotan kelas lahan dalam penelitian ini menggunakan parameter fungsi lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Bobot Kelas Jalan

No.	Kelas Jalan	Bobot
1	Jalan Arteri	0,095
2	Jalan Kolektor	0,009
3	Jalan Lokal	0,180

Sumber: Rusdi Nengsih, (2015)

**Tabel 2.** Bobot Kelas Tutupan Lahan

No.	Kelas Tutupan Lahan	Bobot
1	Permukiman	0,270
2	Persawahan	0,272
3	Tegalan Ladang	0,142
4	Penutup Lahan Lain	0,00

Sumber: Rusdi Nengsih, (2015)

Setiap tipe tutupan dan penggunaan lahan memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang berbeda-beda (Hariyatno *et al.*, 2018). Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan variasi potensi aktivitas manusia pada masing-masing tipe tutupan lahan. Potensi aktivitas manusia inilah yang dapat dijadikan indikator keberadaan populasi penduduk dalam suatu wilayah (Rusdi Nengsih, 2015). Adapun formulasi pemodelan distribusi penduduk dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

$$P_{ij}^0 = \frac{W_{i \text{ total}}}{\sum_{j=1} W_{\text{total}}} \times P_{0j}$$

Keterangan:

$P_{ij}^0$  = Jumlah Penduduk grid ke-i di Area KPI

$W_{i \text{ tot}}$  = Bobot Densitas penduduk berdasarkan kelas lahan dan jenis jalan pada grid ke i

$P_{0j}$  = Populasi Penduduk di Area KPI

$\sum_{i=1} W_{\text{total}}$  = Jumlah Bobot Densitas penduduk dari Seluruh grid pada di Area KPI

Data populasi penduduk diperoleh dari Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju Tahun 2024. Data yang digunakan sebagai input dalam formula tersebut adalah jumlah penduduk per kecamatan. Kabupaten Mamuju terdiri atas 11 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga variasi ini menjadi variabel penting dalam proses pemodelan distribusi penduduk. Selain tutupan lahan, faktor lain yang memengaruhi distribusi penduduk adalah kelas jalan. Kehadiran jaringan jalan dapat meningkatkan intensitas aktivitas manusia pada suatu area. Dalam konteks pemodelan grid, apabila pada suatu grid nilai bobot kelas jalan lebih besar dibandingkan bobot kelas tutupan lahannya, maka bobot kelas tutupan lahan tersebut akan disubstitusi oleh bobot kelas jalan. Dengan demikian, kelas jalan berfungsi sebagai faktor dominan yang mengoreksi estimasi sebaran penduduk pada grid terkait.

### II.1.2 Analisis Ketersediaan Lahan

Analisis ketersediaan lahan di Kabupaten Mamuju dalam penelitian ini menggunakan metode *weighted overlay*, yaitu teknik analisis spasial yang menggabungkan berbagai lapisan (*layer*) peta berdasarkan bobot tertentu sesuai faktor-faktor yang memengaruhi penilaian kerentanan dan

potensi pemanfaatan lahan. Metode ini efektif untuk menyelesaikan persoalan multikriteria, termasuk pemilihan lokasi optimal dan pemodelan kesesuaian lahan (Adininggar *et al.*, 2016). Tahapan analisis mencakup evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta analisis kondisi penguasaan lahan untuk memperoleh gambaran status dan struktur pemanfaatan lahan. Setelah informasi mengenai kesesuaian lahan dan penguasaan lahan diperoleh, dilakukan proses *weighted overlay* guna mengidentifikasi tingkat ketersediaan lahan sehingga dapat dipetakan area yang tersedia, terbatas, atau tidak tersedia untuk kegiatan budidaya, pembangunan, maupun investasi.

### II.1.3 Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah

Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan melalui penyusunan matriks kesesuaian yang membandingkan kondisi aktual pemanfaatan lahan dengan zonasi pemanfaatan ruang dalam RTRW. Matriks tersebut kemudian diisi dengan kategori Sesuai (S) dan Tidak Sesuai (TS) untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian setiap kelas penggunaan lahan. Adapun struktur matriks kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Matriks Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Penggunaan Lahan	Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju				
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	Area parkir dan lapangan	TS	TS	TS	TS	TS
2	Bangunan bukan permukiman (Industri, Bandara/Pelabuhan, dll)	TS	TS	TS	TS	TS
3	Bangunan Permukiman/campuran	TS	TS	TS	TS	S
4	Danau telaga alami	S	S	S	S	S
5	Hamparan Pasir	S	S	S	S	S
6	Hutan	S	S	S	S	S
7	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	TS	TS	TS	TS	S
8	Jaringan jalan	TS	TS	TS	TS	S
9	Kebun campuran	TS	TS	TS	TS	TS
10	Kolam air tawar	TS	TS	TS	TS	TS
11	Lahan terbuka Alami lainnya	S	S	S	S	S
12	Landasan Pacu ( <i>Runway</i> ) dan <i>Taxiway</i>	TS	TS	TS	TS	TS
13	<i>Mangrove</i>	S	TS	TS	TS	S
14	Padang Rumput	S	S	S	S	S
15	Perkebunan	TS	TS	TS	TS	TS
16	Permukaan/Lapangan diperkeras	TS	TS	TS	TS	TS
17	Sabana	S	S	S	S	TS
18	Saluran air	TS	TS	TS	TS	TS
19	Sawah	TS	TS	TS	TS	S
20	Semak Belukar (Belukar)	S	S	S	S	S

Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju						
No	Penggunaan Lahan	Hutan Lindung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Kawasan Ekosistem Mangrove
21	Sungai	S	S	S	S	S
22	Tambak	TS	TS	TS	TS	S
23	Tegalan/Ladang	TS	TS	TS	TS	TS
24	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	TS	TS	TS	TS	TS

Sumber: (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020)

Tabel 3. (Lanjutan)

Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju					
No	Penggunaan Lahan	Kawasan Industri	Kawasan Perikanan Budidaya	Kawasan Perkebunan	Kawasan Permukiman Perdesaan
1	Area parkir dan lapangan	S	S	S	S
2	Bangunan bukan permukiman (Industri, Bandara/Pelabuhan, dll)	S	TS	TS	S
3	Bangunan Permukiman/campuran	S	S	S	S
4	Danau telaga alami	S	S	S	S
5	Hamparan Pasir	S	S	S	S
6	Hutan	S	TS	TS	S
7	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	S	TS	TS	S
8	Jaringan jalan	S	S	S	S
9	Kebun campuran	TS	TS	S	S
10	Kolam air tawar	TS	S	S	S
11	Lahan terbuka Alami lainnya	S	S	S	S
12	Landasan Pacu ( <i>Runway</i> ) dan <i>Taxiway</i>	TS	TS	TS	S
13	<i>Mangrove</i>	TS	S	TS	S
14	Padang Rumput	S	S	TS	S
15	Perkebunan	TS	TS	S	S
16	Permukaan/Lapangan diperkeras	S	S	S	S
17	Sabana	S	TS	S	S
18	Saluran air	S	S	S	S
19	Sawah	TS	S	S	S
20	Semak Belukar (Belukar)	S	S	S	S
21	Sungai	S	S	S	S
22	Tambak	TS	S	TS	S
23	Tegalan/Ladang	TS	S	S	S
24	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	S	TS	TS	TS

Sumber: (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020)

Tabel 3. (Lanjutan)

Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju					
No	Penggunaan Lahan	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	Kawasan Tanaman Pangan	Sempadan Pantai
1	Area parkir dan lapangan	S	S	TS	S
2	Bangunan bukan permukiman (Industri, Bandara/Pelabuhan, dll)	S	S	TS	S
3	Bangunan Permukiman/campuran	S	S	S	S
4	Danau telaga alami	S	S	S	TS
5	Hamparan Pasir	S	S	S	S
6	Hutan	S	S	TS	S
7	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	S	S	TS	S
8	Jaringan jalan	S	S	S	S
9	Kebun campuran	TS	S	S	S
10	Kolam air tawar	S	S	S	S
11	Lahan terbuka Alami lainnya	S	S	S	S
12	Landasan Pacu ( <i>Runway</i> ) dan <i>Taxiway</i>	S	TS	TS	S
13	<i>Mangrove</i>	TS	S	S	S
14	Padang Rumput	S	S	S	S
15	Perkebunan	TS	S	TS	S
16	Permukaan/Lapangan diperkeras	S	S	TS	S
17	Sabana	TS	TS	TS	TS
18	Saluran air	S	S	S	S
19	Sawah	TS	TS	S	S
20	Semak Belukar (Belukar)	TS	TS	S	S
21	Sungai	S	S	S	S
22	Tambak	TS	TS	TS	S
23	Tegalan/Ladang	TS	S	S	S
24	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	TS	TS	TS	TS

Sumber: (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020)

Tabel 3. (Lanjutan)

Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju						
No	Penggunaan Lahan	Sempadan Sungai	Suaka Pulau Kecil	Taman Nasional	Taman Pulau Kecil	Wisata Alam
1	Area parkir dan lapangan	S	TS	TS	TS	S
2	Bangunan bukan permukiman (Industri, Bandara/Pelabuhan, dll)	TS	TS	TS	TS	TS

No	Penggunaan Lahan	Arahan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Mamuju				
		Sempadan Sungai	Suaka Pulau Kecil	Taman Nasional	Taman Pulau Kecil	Wisata Alam
3	Bangunan Permukiman/campuran	S	TS	TS	TS	S
4	Danau telaga alami	S	S	S	S	S
5	Hamparan Pasir	S	S	TS	S	S
6	Hutan	S	S	S	S	TS
7	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	S	TS	TS	TS	TS
8	Jaringan jalan	S	TS	TS	TS	S
9	Kebun campuran	S	TS	TS	TS	TS
10	Kolam air tawar	S	S	TS	TS	S
11	Lahan terbuka Alami lainnya	S	S	S	S	S
12	Landasan Pacu ( <i>Runway</i> ) dan <i>Taxiway</i>	TS	TS	TS	TS	TS
13	<i>Mangrove</i>	S	S	TS	S	S
14	Padang Rumput	S	S	TS	TS	S
15	Perkebunan	S	TS	TS	TS	TS
16	Permukaan/Lapangan diperkeras	TS	TS	TS	TS	S
17	Sabana	S	TS	S	S	TS
18	Saluran air	S	TS	TS	TS	S
19	Sawah	S	TS	TS	TS	TS
20	Semak Belukar (Belukar)	S	S	S	S	TS
21	Sungai	S	TS	S	TS	S
22	Tambak	S	TS	TS	TS	TS
23	Tegalan/Ladang	S	TS	TS	TS	TS
24	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	TS	TS	TS	TS	TS

Sumber: (Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020)

#### II.1.4 Analisis Kondisi Penguasaan Lahan

Penguasaan lahan merupakan hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum dengan bidang tanah yang dikuasainya. Bentuk penguasaan Lahan dapat beragam, antara lain pemilikan formal, penyakapan, gadai, sewa, hingga Hak Guna Usaha sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid *et al.* (2022). Informasi mengenai Gambaran Umum Penguasaan Lahan dapat diperoleh melalui kantor pertanahan setempat sebagai lembaga yang berwenang mengelola data administrasi pertanahan.

#### II.1.5 Analisis Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan merupakan perimbangan antara penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan lahan pada suatu fungsi kawasan yang memberikan gambaran mengenai peluang serta kendala pembangunan oleh pemerintah maupun masyarakat. Analisis ketersediaan lahan dilakukan untuk mengetahui potensi lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan tertentu, berdasarkan kesesuaian penggunaan lahan dan status penguasaan atau pemilikan lahan. Dalam analisis ini, ketersediaan lahan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: (1) Tersedia, yaitu lahan yang

bukan merupakan kawasan hutan, memiliki kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW yang dinyatakan sesuai, serta dalam Gambaran Umum Penguasaan Lahan tergolong sebagai tanah wakaf badan hukum atau perorangan, tanah belum terdaftar badan hukum atau perorangan, tanah komunal, dan/atau tanah negara yang dikuasai negara; dan (2) Tidak Tersedia, yaitu lahan yang termasuk kawasan hutan, memiliki kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW yang dinyatakan tidak sesuai, serta tidak tergolong sebagai tanah wakaf badan hukum atau perorangan, tanah belum terdaftar badan hukum atau perorangan, tanah komunal, maupun tanah negara yang dikuasai negara.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Profil lokasi dan karakteristik administratif Kabupaten Mamuju mencerminkan keragaman kondisi kewilayahan yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, serta arah pembangunan daerah. Struktur administrasinya terdiri atas sebelas kecamatan dengan konfigurasi persebaran penduduk yang tidak merata, menunjukkan adanya pusat-pusat konsentrasi aktivitas serta wilayah dengan tekanan pembangunan yang relatif rendah. Rata-rata jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Mamuju mencapai sekitar 26.340 jiwa, dihitung berdasarkan total populasi 289.742 jiwa yang tersebar pada sebelas kecamatan. Nilai rata-rata ini memberikan gambaran umum mengenai skala kepadatan penduduk antarwilayah, meskipun distribusinya menunjukkan variasi yang signifikan antara kecamatan berpenduduk besar dan kecamatan dengan konsentrasi penduduk yang relatif rendah. Pola distribusi tersebut mengindikasikan adanya disparitas kepadatan penduduk antarkecamatan yang berimplikasi langsung pada kebutuhan infrastruktur, layanan dasar, serta alokasi ruang dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pemahaman terhadap struktur administratif dan tren distribusi penduduk ini menjadi dasar penting dalam analisis kebutuhan lahan berdasarkan distribusi sebaran penduduk.

**III.1 Sebaran distribusi Penduduk Kabupaten Mamuju**

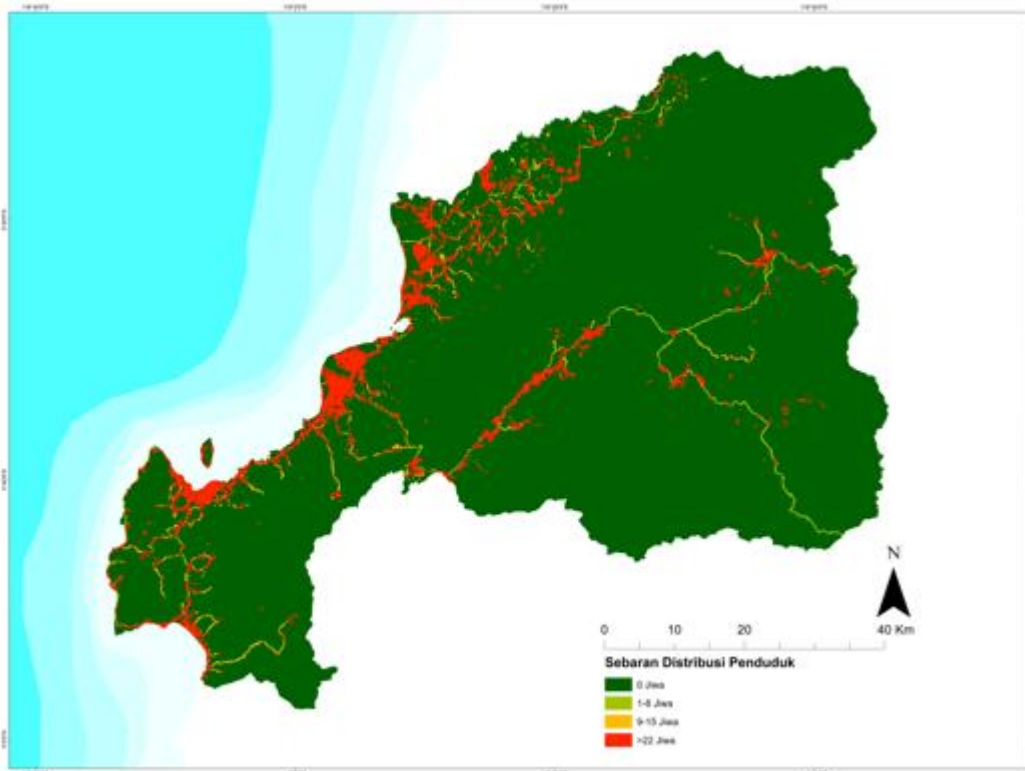
Gambaran mengenai distribusi dan skala kependudukan pada tingkat kecamatan menjadi elemen penting dalam memahami karakteristik demografis suatu wilayah. Analisis terhadap rata-rata jumlah penduduk diperlukan untuk memberikan indikasi awal terkait tingkat kepadatan serta persebaran penduduk antarkecamatan. Informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan analisis distribusi spasial selengkapnya disajikan pada Tabel 4 dan Peta distribusi penduduk di Kabupaten Mamuju ditampilkan pada Gambar 1.

**Tabel 4.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Distribusi Spasial di Kabupaten Mamuju

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Bonehau	29122	10,05
2	Kalukku	66160	22,83
3	Kalumpang	25757	8,89
4	Kep. Bala Balakang	1650	0,57
5	Mamuju	22683	7,83
6	Papalang	33139	11,44
7	Sampaga	19380	6,69
8	Simboro dan Kepulauan	23682	8,17
9	Tapalang	16986	5,86
10	Tapalang Barat	10320	3,56
11	Tommo	40863	14,10
Total (Jiwa)		289.742	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Data penduduk menunjukkan bahwa Kecamatan Kalukku memiliki proporsi terbesar, yaitu 22,83 persen dari total 289.742 jiwa, disusul Tommo sebesar 14,10 persen dan Papalang sebesar 11,44 persen. Bonehau, Kalumpang, Simboro dan Kepulauan, serta Mamuju berada pada kisaran 7–10 persen, sedangkan persentase terendah tercatat di Kepulauan Bala-Balakang dengan 0,57 persen data ini menunjukkan konsentrasi penduduk yang lebih rendah di wilayah kepulauan dan pinggiran. Secara keseluruhan, distribusi penduduk di Kabupaten Mamuju menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Beberapa kecamatan memiliki populasi yang padat, sehingga membutuhkan fasilitas publik, infrastruktur, dan layanan sosial yang lebih banyak, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk rendah menghadapi tantangan berbeda terkait aksesibilitas dan pemanfaatan sumber daya.



Gambar 1. Peta Sebaran Distribusi Penduduk Kabupaten Mamuju  
 Sumber: Hasil Analisis, 2025

### III.2 Ketersediaan Lahan Kabupaten Mamuju

#### III.2.1 Analisis Penutupan Lahan Kabupaten Mamuju

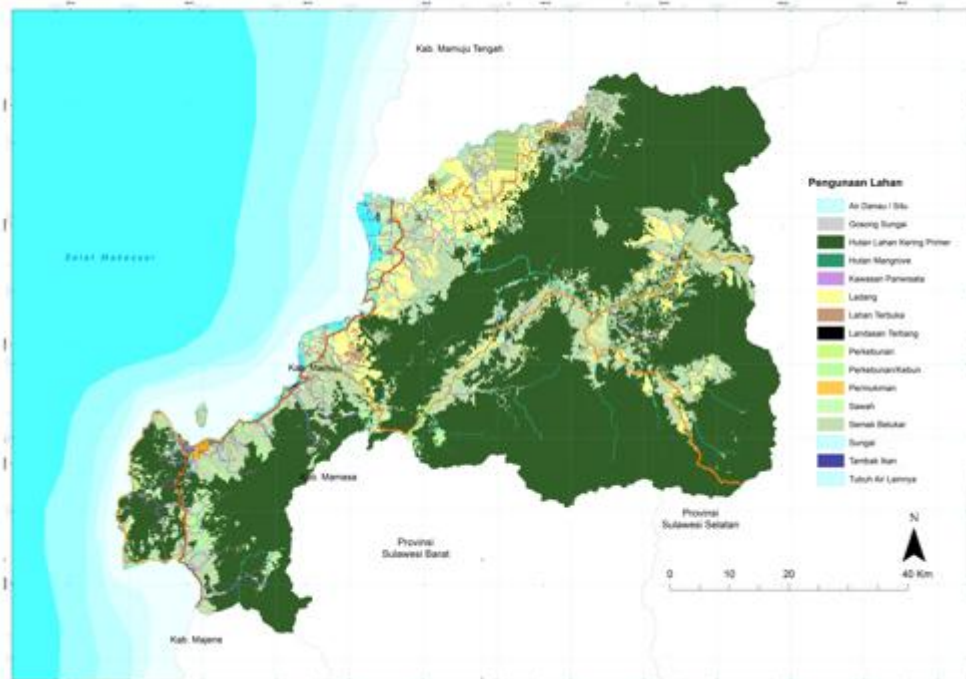
Aspek penutupan lahan merupakan faktor penting dalam menilai kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil analisis, penggunaan lahan di wilayah ini didominasi oleh kawasan hutan dengan luas mencapai 3.020,50 km<sup>2</sup> yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Selain itu, terdapat pula penggunaan lahan untuk area budidaya, seperti perkebunan seluas 171,09 km<sup>2</sup> dan sawah seluas 96,67 km<sup>2</sup>, dari total luas wilayah 4.950,82 km<sup>2</sup>. Informasi lebih rinci mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 5. Penggunaan Lahan Kabupaten Mamuju

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Area parkir dan lapangan	0,46	0,01
2	Bangunan bukan permukiman (Industri, Bandara/Pelabuhan, dll)	1,85	0,04

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
3	Bangunan Permukiman/campuran	62,46	1,26
4	Danau telaga alami	0,13	0,00
5	Hamparan Pasir	2,56	0,05
6	Hutan	3.020,52	61,01
7	Hutan Kota, jalur hijau dan taman kota	0,11	0,00
8	Jaringan jalan	0,19	0,00
9	Kebun campuran	365,34	7,38
10	Kolam air tawar	0,34	0,01
11	Lahan terbuka Alami lainnya	10,39	0,21
12	Landasan Pacu ( <i>Runway</i> ) dan <i>Taxiway</i>	0,15	0,00
13	<i>Mangrove</i>	3,37	0,07
14	Padang Rumput	10,95	0,22
15	Perkebunan	171,09	3,46
16	Permukaan/Lapangan diperkeras	0,26	0,01
17	Sabana	116,14	2,35
18	Saluran air	0,21	0,00
19	Sawah	96,67	1,95
20	Semak Belukar ( <i>Belukar</i> )	579,99	11,72
21	Sungai	32,83	0,66
22	Tambak	34,87	0,70
23	Tegalan/Ladang	142,91	2,89
24	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	0,03	0,00
25	( <i>blank</i> )	297,00	6,00
Luas Total (Km <sup>2</sup> )		4.950,82	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mamuju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

### III.2.2 Rencana Tata Ruang Kabupaten Mamuju

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019–2039. Dokumen ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang, termasuk pengaturan rencana pola ruang wilayah. Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa kawasan hutan lindung merupakan zona dengan luasan terbesar dalam pengaturan pola ruang wilayah di Kabupaten Mamuju, yaitu seluas 1.531,39 km<sup>2</sup>. Kawasan hutan produksi terbatas memiliki luas 953,56 km<sup>2</sup>, dan Taman Nasional Gandang Dewata mencakup area seluas 728,85 km<sup>2</sup>. Sementara itu, zona dengan luasan paling kecil adalah suaka pulau kecil, yaitu hanya 0,02 km<sup>2</sup>, yang berlokasi di gugusan Kepulauan Bala Balakang. Adapun luasan untuk setiap kategori rencana pola ruang di Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut.

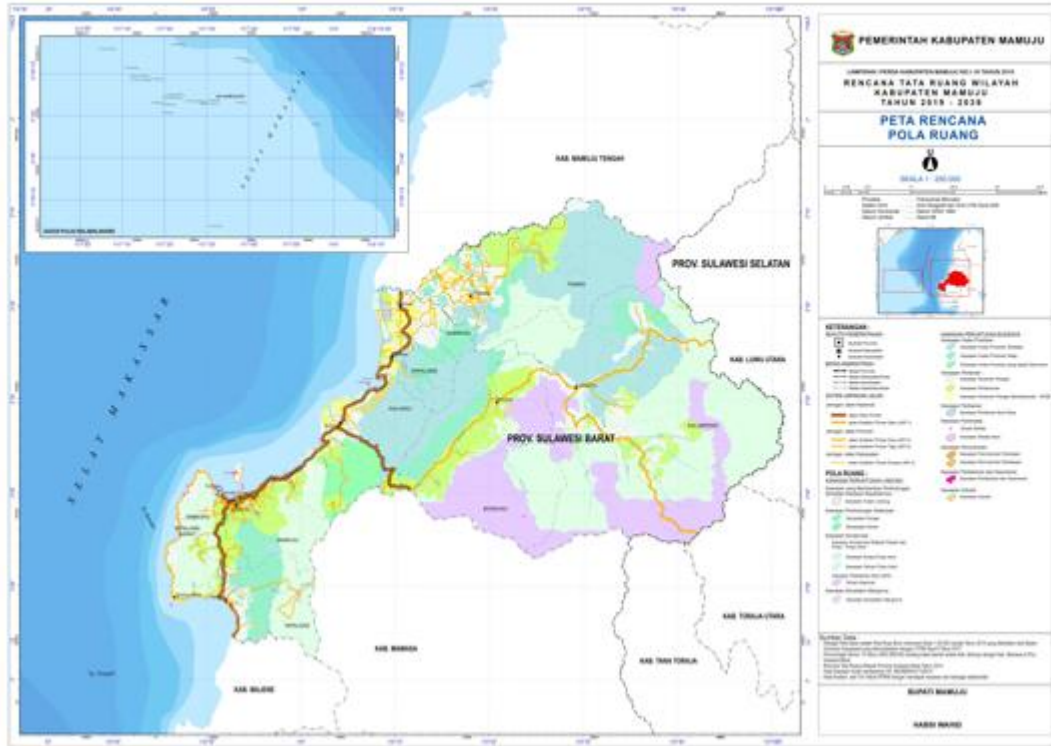
**Tabel 6.** Penggunaan Lahan Kabupaten Mamuju

No	Penggunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	1.531,39	30,93
2	Hutan Produksi Konversi	108,45	2,19
3	Hutan Produksi Terbatas	953,56	19,26
4	Hutan Produksi Tetap	408,79	8,26
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	4,11	0,08
6	Kawasan Industri	13,13	0,27
7	Kawasan Perikanan Budidaya	16,57	0,33
8	Kawasan Perkebunan	510,16	10,30
9	Kawasan Permukiman Perdesaan	23,14	0,47
10	Kawasan Permukiman Perkotaan	13,86	0,28
11	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	0,36	0,01
12	Kawasan Tanaman Pangan	537,96	10,87
13	Sempadan Pantai	8,58	0,17
14	Sempadan Sungai	90,44	1,83
15	Suaka Pulau Kecil	0,02	0,00
16	Taman Nasional	728,85	14,72
17	Taman Pulau Kecil	0,38	0,01
18	Wisata Alam	1,06	0,02
Luas Total (Km <sup>2</sup> )		4.950,82	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan peta penggunaan lahan dan peta RTRW di Kabupaten Mamuju, selanjutnya dilakukan proses identifikasi tingkat kesesuaian antara kondisi penggunaan lahan aktual dan ketentuan dalam RTRW. Identifikasi tersebut mengacu pada matriks kesesuaian yang disajikan pada tabel 3 diatas.

Berdasarkan matriks kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW di Kabupaten Mamuju, terlihat distribusi luas lahan menurut pola ruang dan tingkat kesesuaiannya. Dari total luas wilayah 4.950,82 km<sup>2</sup>, sebagian besar lahan digunakan sesuai RTRW, yaitu 4.048,22 km<sup>2</sup>, terutama pada kawasan hutan lindung (1.228,02 km<sup>2</sup>), hutan produksi terbatas (861,86 km<sup>2</sup>), dan hutan produksi tetap (324,24 km<sup>2</sup>). Kawasan lain yang sebagian besar sesuai RTRW antara lain kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan industri, serta kawasan taman nasional, menunjukkan pengelolaan lahan yang relatif mengikuti rencana tata ruang pada sektor hutan dan kawasan strategis.



Gambar 3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Di sisi lain, terdapat lahan yang tidak sesuai RTRW seluas 605,60 km<sup>2</sup>, dengan 297,00 km<sup>2</sup> berada di luar deliniasi rencana. Ketidaksesuaian ini terutama terjadi pada kawasan perkebunan (173,50 km<sup>2</sup>), tanaman pangan (156,44 km<sup>2</sup>), serta sebagian kawasan hutan lindung (67,47 km<sup>2</sup>), yang menunjukkan adanya tekanan terhadap struktur ruang dan pergeseran fungsi lahan dari rencana menuju pemanfaatan aktual di lapangan. Sejalan dengan temuan berbagai penelitian keruangan, kondisi ini umumnya berkaitan dengan ekspansi penggunaan lahan yang tidak terkontrol, terutama pada sektor budidaya, yang dipicu oleh dorongan ekonomi lokal dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

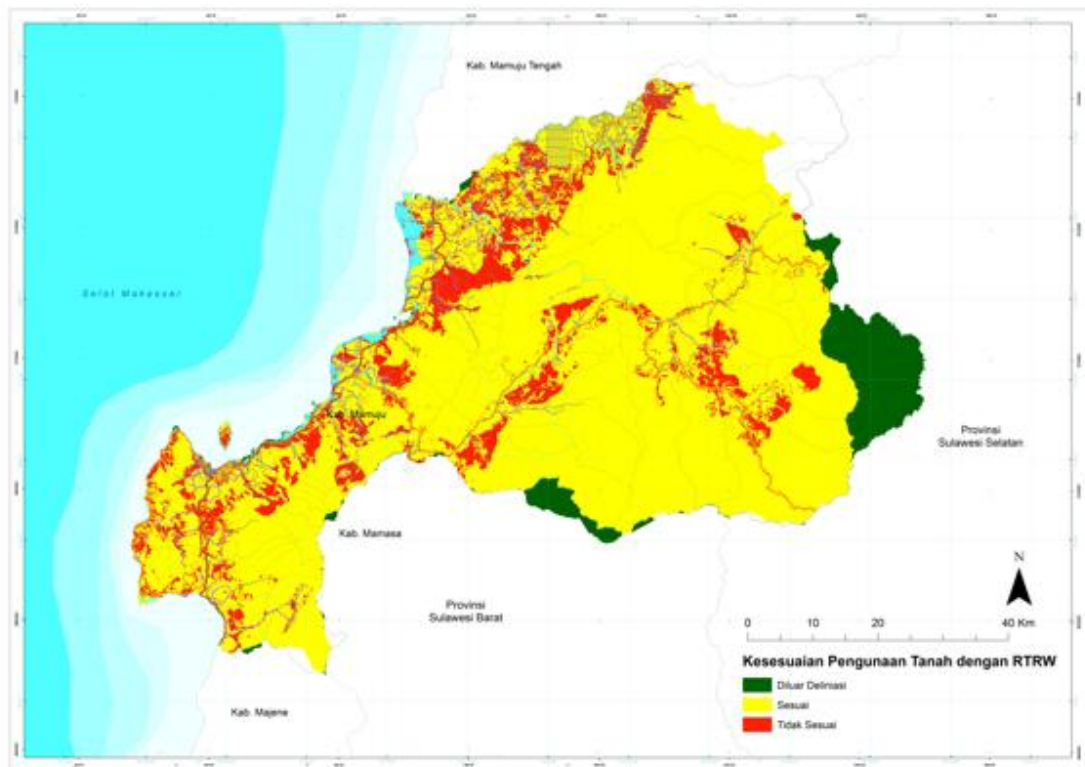
Ketidaksesuaian pada kawasan lindung mengindikasikan potensi terjadinya fragmentasi ekologis yang dapat mengganggu konektivitas dan fungsi lingkungan. Dalam jangka panjang, pola ini juga berkontribusi terhadap terbentuknya struktur ruang yang tidak teratur dan tidak terkonsolidasi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya biaya penyediaan infrastruktur serta menurunnya daya dukung wilayah. Dengan demikian, fenomena ini mencerminkan gejala keruangan yang tidak hanya menunjukkan deviasi terhadap rencana tata ruang, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan wilayah secara keseluruhan.

Tabel 7. Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Pola Ruang RTRW	Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan RTRW			Luas Total (Km <sup>2</sup> )
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diluar Deliniasi	
1	Hutan Lindung	1.228,02	67,47	235,90	1.531,39
2	Hutan Produksi Konversi	84,79	23,06	0,60	108,45
3	Hutan Produksi Terbatas	861,86	90,14	1,56	953,56

No	Pola Ruang RTRW	Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan RTRW			Luas Total (Km <sup>2</sup> )
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diluar Deliniasi	
4	Hutan Produksi Tetap	324,24	84,49	0,06	408,79
5	Kawasan Ekosistem <i>Mangrove</i>	2,20	0,18	1,74	4,11
6	Kawasan Industri	10,67	2,46		13,13
7	Kawasan Perikanan Budidaya	14,29	1,62	0,67	16,57
8	Kawasan Perkebunan	335,80	173,50	0,86	510,16
9	Kawasan Permukiman Perdesaan	22,97		0,18	23,14
10	Kawasan Permukiman Perkotaan	9,55	4,16	0,15	13,86
11	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	0,33	0,02		0,36
12	Kawasan Tanaman Pangan	378,36	156,44	3,15	537,96
13	Sempadan Pantai	7,55		1,04	8,58
14	Sempadan Sungai	87,83	0,05	2,57	90,44
15	Suaka Pulau Kecil			0,02	0,02
16	Taman Nasional	679,05	1,64	48,16	728,85
17	Taman Pulau Kecil	0,26		0,13	0,38
18	Wisata Alam	0,48	0,36	0,22	1,06
Luas Total (Km <sup>2</sup> )		4.048,22	605,60	297,00	4.950,82

Sumber: Hasil Analisis, 2025



**Gambar 4.** Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

**III.2.3 Analisis Status Kepemilikan Lahan dan Ketersediaan Tanah Kabupaten Mamuju**

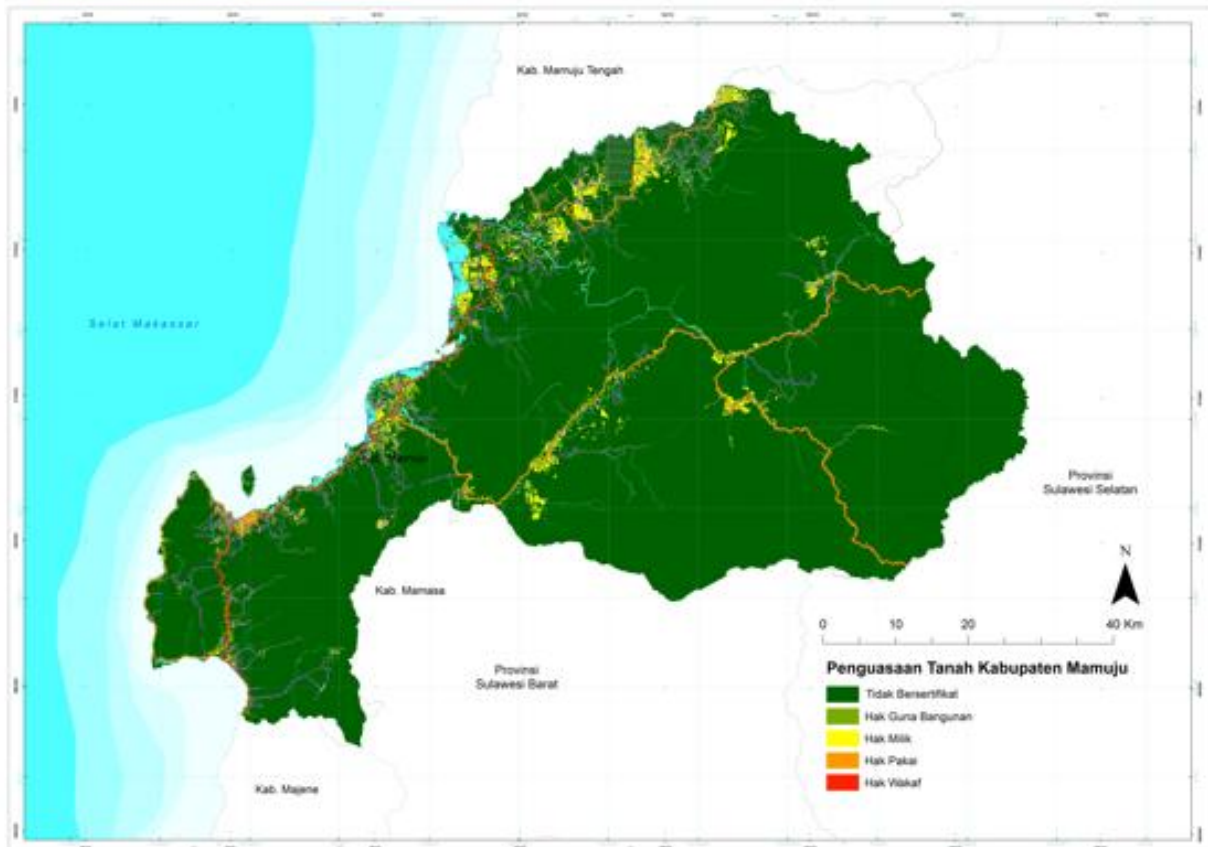
Bersumber data persil tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, diperoleh gambaran umum status kepemilikan lahan di Kabupaten Mamuju hingga tahun 2024. Data ini mencerminkan sebaran kepemilikan lahan di seluruh wilayah kabupaten, baik yang dikuasai oleh pemerintah, perorangan, maupun badan usaha sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

**Tabel 8.** Gambaran Umum Kepemilikan Lahan Kab. Mamuju

No	Pengunaan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Hak Guna Bangunan	2,76	0,06
2	Hak Milik	161,10	3,25
3	Hak Pakai	4,63	0,09
4	Hak Wakaf	0,03	0,00
5	Belum Memiliki Sertifikat	4.782,31	96,60
Luas Total (Km <sup>2</sup> )		4.950,82	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Data penguasaan tanah di Kabupaten Mamuju hingga tahun 2024, terlihat bahwa sebagian besar lahan belum memiliki sertifikat, yaitu seluas 4.782,31 km<sup>2</sup> atau sekitar 96,60% dari total luas wilayah 4.950,82 km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tanah di Kabupaten Mamuju masih dalam status belum terdaftar secara formal, sehingga pengaturan dan kepastian hukum atas kepemilikannya masih terbatas. Sementara itu, lahan yang sudah memiliki Hak Milik tercatat seluas 161,10 km<sup>2</sup> (3,25%), diikuti oleh Hak Guna Bangunan seluas 2,76 km<sup>2</sup> (0,06%), Hak Pakai seluas 4,63 km<sup>2</sup> (0,09%), dan Hak Wakaf hanya 0,03 km<sup>2</sup> (0,00%).



**Gambar 5.** Peta Penguasaan Tanah Kabupaten Mamuju

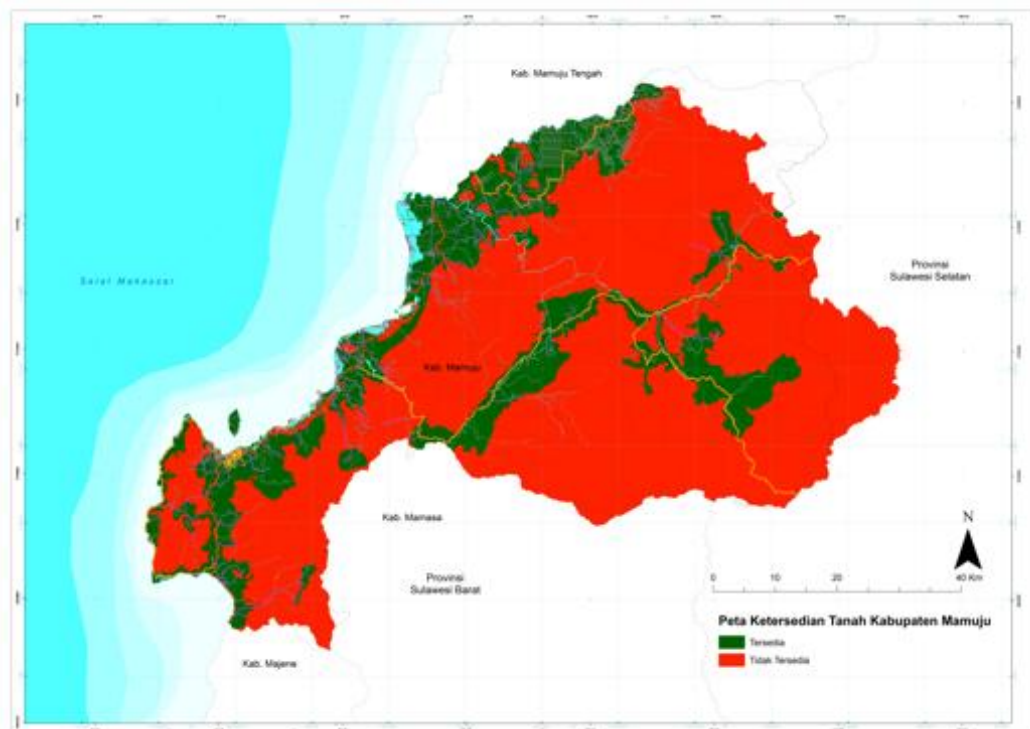
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju serta gambaran umum kepemilikan lahan, berikutnya melakukan analisis ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu lahan tersedia dan lahan tidak tersedia. Luas lahan yang tersedia di Kabupaten Mamuju untuk kegiatan budidaya, pembangunan, dan investasi mencapai 1.215 km<sup>2</sup>, sedangkan lahan yang tidak tersedia seluas 3.736 km<sup>2</sup>. Hasil ini memberikan gambaran potensi lahan yang dapat dimanfaatkan serta lahan yang masih memerlukan perlindungan atau pengelolaan khusus, sehingga menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya lahan di Kab. Mamuju.

**Tabel 9.** Gambaran Umum Ketersediaan Lahan Kab. Mamuju

No	Kecamatan	Ketersediaan Lahan (Km <sup>2</sup> )		Luas (Km <sup>2</sup> )	
		Tersedia	Tidak Tersedia	(Km <sup>2</sup> )	%
1	Kep Bala Balakang	1	0	1	0
2	Bonehau	172	697	869	18
3	Kalukku	139	314	452	9
4	Kalumpang	239	1.551	1.790	36
5	Mamuju	101	146	246	5
6	Papalang	74	127	201	4
7	Sampaga	69	41	110	2
8	Simboro dan Kepulauan	70	62	132	3
9	Tapalang	58	213	272	5
10	Tapalang Barat	34	78	111	2
11	Tommo	259	506	765	15
<b>Luas Total (Km<sup>2</sup>)</b>		<b>1.215</b>	<b>3.736</b>	<b>4.950</b>	<b>100</b>

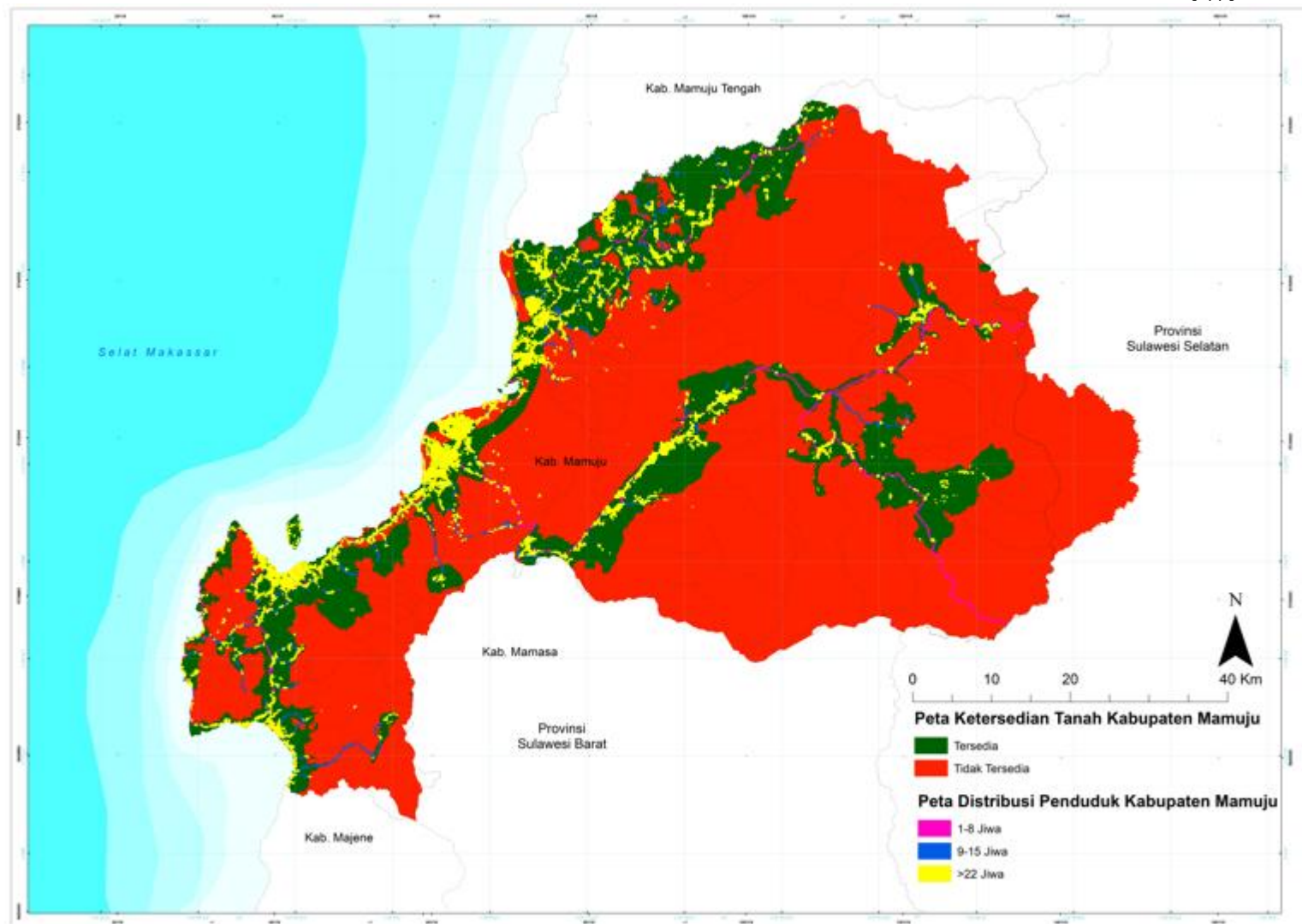
Sumber: Hasil Analisis, 2025



**Gambar 6.** Peta Ketersediaan Tanah Kabupaten Mamuju

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis distribusi penduduk di Kab. Mamuju menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, yakni 259.539 jiwa, berada pada lahan yang tersedia, sementara 29.520 jiwa terdistribusi pada lahan yang tidak tersedia yang diduga berada di kawasan lindung sesuai ketentuan RTRW, dalam berbagai temuan penelitian keruangan, pola seperti ini sering dikaitkan dengan gejala tekanan penduduk terhadap ruang, di mana keterbatasan lahan layak mendorong okupasi ke kawasan lindung yang berimplikasi pada potensi degradasi lingkungan, fragmentasi ekologis, serta meningkatnya risiko bencana, sekaligus mencerminkan ketidakseimbangan distribusi penduduk dan akses terhadap lahan yang dalam jangka panjang dapat memicu pertumbuhan permukiman tidak terencana dan melemahkan efektivitas pengendalian tata ruang.



**Gambar 7.** Peta Distribusi Penduduk dan Ketersediaan Lahan Kabupaten Mamuju  
*Sumber: Hasil Analisis, 2025*

### **III. KESIMPULAN**

Analisis distribusi penduduk di Kabupaten Mamuju menunjukkan adanya ketimpangan spasial yang nyata antarwilayah administrasi. Kecamatan Kalukku menjadi wilayah dengan proporsi penduduk terbesar, yaitu 22,83 persen, diikuti Tommo sebesar 14,10 persen dan Papalang sebesar 11,44 persen. Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Bala-Balakang hanya menyumbang 0,57 persen dari total penduduk. Ketimpangan ini menggambarkan konsentrasi penduduk yang terkonsentrasi pada kawasan daratan utama, sementara wilayah perifer dan kepulauan menghadapi tantangan terkait keterjangkauan layanan dasar dan pemanfaatan ruang.

Dari sisi kesesuaian penggunaan lahan, mayoritas wilayah Kabupaten Mamuju telah dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu seluas 4.048,22 km<sup>2</sup> dari total 4.950,82 km<sup>2</sup>. Pemanfaatan yang sesuai terutama didominasi oleh kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, serta kawasan strategis lainnya seperti kawasan industri dan kawasan pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa secara makro, pengaturan ruang pada kawasan hutan relatif mengikuti arah kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Meski demikian, masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan seluas 605,60 km<sup>2</sup>, termasuk 297,00 km<sup>2</sup> yang berada di luar deliniasi rencana. Ketidaksesuaian terbesar terjadi pada kawasan perkebunan, tanaman pangan, serta sebagian kawasan hutan lindung. Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan penggunaan lahan yang dipicu oleh ekspansi budidaya dan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian keruangan sebelumnya yang menunjukkan bahwa konversi lahan pada wilayah berkembang seringkali terjadi karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan kurang optimalnya pengawasan di lapangan.

Dari aspek penguasaan dan ketersediaan lahan, sebanyak 96,60 persen lahan di Kabupaten Mamuju belum terdaftar secara formal, menunjukkan masih rendahnya kepastian hukum penguasaan dan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap konflik lahan. Ketersediaan lahan untuk kegiatan budidaya, pembangunan, dan investasi mencapai 1.215 km<sup>2</sup>, sementara 3.736 km<sup>2</sup> tergolong tidak tersedia karena didominasi kawasan lindung. Distribusi penduduk menunjukkan bahwa 259.539 jiwa berada pada lahan yang tersedia, sedangkan 29.520 jiwa tinggal pada lahan tidak tersedia yang sebagian besar berada dalam kawasan lindung. Temuan ini menegaskan perlunya penataan kembali pemanfaatan ruang, penguatan pengendalian penggunaan lahan, serta percepatan pendaftaran dan reforma agraria guna mewujudkan tata kelola ruang yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan ke depan antara lain: pertama, melakukan evaluasi dan revisi kebijakan sektoral terkait penetapan kawasan lindung di Kabupaten Mamuju; kedua, melakukan inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang menjadi objek reforma agraria, serta menerapkan mekanisme retribusi tanah kepada masyarakat Kabupaten Mamuju. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria menjadi lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna, sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adininggar, F. W., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2016). Pembuatan Peta Potensi Lahan Berdasarkan Kondisi Fisik Lahan Menggunakan Metode Weighted Overlay. *Jurnal Geodesi Undip*, 5(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. (2025). *Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2025*.
- Balsa-Barreiro, J., Morales, A. J., & Lois-González, R. C. (2021). Mapping Population Dynamics at Local Scales Using Spatial Networks. *Complexity*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/8632086>
- Djakaria, D. V. S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 253-293. <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2991>
- Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. *FIG Commission 7 Symposium On Innovative Technologies for Land Administration, July 2005*.
- Hariyatno, D., Deden, D., Iis, A., & Wicaksono, D. (2018). *Dinamika Tutupan Lahan : Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Penulis* (Issue May).
- Harsono, B. (1999). *Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Cetakan VI).
- Jayadi, R. (2020). Penataan Ruang di Kabupaten Mamuju Sebagai Bentuk Mitigasi Aglomerasi Ekonomi. *Wacana Info*. [https://wacana.info/berita/5271/farid\\_pra2000](https://wacana.info/berita/5271/farid_pra2000)
- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. (2020). *Neraca Penatagunaan Tanah*.
- Lemmen, C., van Oosterom, P., & Bennett, R. (2015). The Land Administration Domain Model. *Land Use Policy*, 49. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.01.014>
- Leyk, S., Gaughan, A. E., Adamo, S. B., De Sherbinin, A., Balk, D., Freire, S., Rose, A., Stevens, F. R., Blankespoor, B., Frye, C., Comenetz, J., Sorichetta, A., Macmanus, K., Pistoiesi, L., Levy, M., Tatem, A. J., & Pesaresi, M. (2019). The spatial allocation of population: a review of large-scale gridded population data products and their fitness for use. *Earth System Science Data*, 11(3). <https://doi.org/10.5194/essd-11-1385-2019>
- Montalvo, J., Ruiz-Labrador, E., Montoya-Bernabéu, P., & Acosta-Gallo, B. (2019). Rural-urban gradients and human population dynamics. *Sustainability (Switzerland)*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/su11113107>
- Pfeifer, J., & Hamann, S. (2018). The nature and nurture of congenital amusia: A twin case study. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 12. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00120>
- Rasyid, S. A., Lapasere, R. S., & Nutfa, M. (2022). Ketimpangan penguasaan tanah, kemiskinan, dan strategi bertahan hidup masyarakat petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8).
- Rusdi Nengsih, S. (2015). Pembangunan Model Distribusi Populasi Penduduk Resolusi Tinggi Untuk Wilayah Indonesia Menggunakan Sistem Grid Skala Ragam. *Geomatika*, 21(1).
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods). *Alfabeta Bandung*.
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Tatem, A. J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. In *Scientific Data* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>
- Tenrisau, A. (2021). Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan LANDASAN PENGELOLAAN PERTANAHAN DALAM SISTEM PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN BASIC LAND MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRARIAN MANAGEMENT SYSTEM. *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*, 11(2).
- Willekens, F. (2016). International Handbook of Migration and Population Distribution. In *International Handbooks of Migration and Population Distribution* (Vol. 6).